

Partai Politik dalam Demokrasi: Katalisator atau Predator?

Hardyanto ¹

Pengantar

Meski masih terdapat wacana dan perdebatan mengenai asal-usul atau awal mula munculnya gagasan demokrasi (*δημοκρατία*, *dimokratía* dalam bahasa Yunani; *democracy* dalam bahasa Inggris); namun demikian, merupakan hal yang sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa pada masa Yunani Kuno filosof Aristotle telah membuat tipologi tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan tersebut meliputi monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, *politeia*, dan demokrasi.² Pada masa sekarang ini bentuk pemerintahan atau sistem politik yang banyak dipilih adalah demokrasi.

¹ Drs. Hardyanto, M.P.A., M.A. adalah Staf Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara RI, Mahasiswa Program Doktor Departemen Ilmu Politik FISIP UI, dan Dosen Tamu Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.

² Banyak rujukan mengenai pemikiran Aristotle tentang demokrasi, antara lain dapat dirujuk dalam Bertrand Russel, *History of the Western Philosophy*, London: Routledge, 1946/2004; Lee Cameron McDonald, *Western Political Theory*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1962/1968; dan William Ebenstein, *Great Political Thinkers, Plato to the Present*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1956.

Menurut Lipson terdapat tiga dasar yang kuat untuk lebih memilih demokrasi: demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang memiliki ketegasan pernyataan bahwa demokrasi mengagungkan martabat manusia, memberikan pembelajaran sipil yang berkelanjutan, dan dengan pembelajaran tersebut-membantu umat manusia menjadi lebih beradab.³ Lebih lanjut Lipson menambahkan bahwa meski demokrasi dengan segala kekurangannya terus mendapatkan kritik bahwa demokrasi bukan merupakan suatu bentuk pemerintahan oleh yang terbaik dan terbijaksana; namun dari semua bentuk pemerintahan yang pernah diketahui dan dicoba, demokrasi adalah yang terbijaksana dan terbaik.⁴

Demokrasi merupakan suatu gagasan filosofis dan bersifat normatif. Dibutuhkan suatu perangkat kelembagaan dan bersifat positif untuk mencapai tahapan demokrasi dalam tataran terapan. Untuk membumikan demokrasi diperlukan suatu wahana praktis. Dan, wahana tersebut, salah satunya, adalah partai politik. Pada kenyataannya, demokrasi kepartaian (*party democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*) melalui proses pemilihan umum telah menjadi sistem politik pilihan pada sebagian besar negara di dunia.

Demokrasi dan Partai Politik

Biezen dan Saward menulis bahwa terdapat kesenjangan antara para teoretisi demokrasi (*democratic theorists*) dan para pengkaji partai politik (*party scholars*). Namun hal ini sangat beralasan mengingat di antara keduanya terdapat pendekatan yang berbeda dalam melihat demokrasi. Para teoretisi demokrasi, antara lain, mendalami demokrasi dengan pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada tingkat makro dan mikro, menggagas teori besar (*grand theory*) yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan, dan menekankan aspek-aspek substantif dalam demokrasi. Sementara itu, para pengkaji partai politik, antara lain, mempelajari demokrasi dengan pendekatan empiris, memusatkan perhatian pada tingkat *meso*

³ Leslie Lipson, *The Democratic Civilization*, New York: Peffer and Simons, Inc., 1964, hal. 249.

⁴ *Ibid.*, hal. 251.

atau menengah, menggunakan dan mengembangkan teori-teori menengah (*middle-range theories*) yang memperhatikan proses dalam sistem, dan menekankan aspek-aspek prosedural dalam demokrasi.⁵ Dengan demikian, pada hakikatnya para teoritis demokrasi dan pengkaji partai politik satu sama lain saling mendukung dalam upaya menciptakan demokrasi dalam suatu masyarakat atau negara.

Pada praktiknya, demokrasi memang memerlukan partai politik. Sejak tahun 1919 Max Weber telah menyatakan bahwa demokrasi tanpa partai politik adalah “tidak terbayangkan” (*unimaginable*). Sementara itu James Bryce pada tahun 1921 menyebutnya sebagai “tidak terhindarkan” (*inevitable*) dan John Aldrich pada tahun 1995 mengatakannya sebagai “tidak dapat bekerja” (*unworkable*). Seymour Martin Lipset, seorang pemikir teori demokrasi, pada tahun 2000 menambahkannya sebagai “tidak tak dibutuhkan” (*indispensability*). Akan tetapi, di antara semua pernyataan di atas, kalimat E.E. Schattschneider yang ditulis pada tahun 1942 adalah pernyataan yang paling sering dikutip dalam khazanah kepustakaan tentang kajian antara demokrasi dengan partai politik; Schattschneider menyatakan: “... *the political parties created democracy and that modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”.⁶

Bahkan Bartolini dan Mair, dua pengkaji partai politik termutakhir, pada tahun 2001 menyatakan: “*parties were [and are] the only institution that deliberately aimed at integrating and making compatible the various processes and institutions of the democratic polity*”.⁷ Selain itu, Biezen pada tahun 2004 menegaskan bahwa partai politik adalah *sine non qua* bentuk pemerintahan demokrasi.⁸

⁵ Rujuk Ingris van Biezen and Michael Saward, “Democratic Theorists and Party Scholars: Why They Don’t Talk to Each Other, and Why They Should”, *Perspectives on Politics*, Vol. 6, No. 1, 2008, hal. 21-35.

⁶ Pernyataan-pernyataan di atas diambil dari beragam kutipan dalam banyak rujukan. Beberapa kepustakaan dalam tulisan ini juga banyak memuat kutipan-kutipan di atas.

⁷ Stefano Bartolini and Peter Mair, “Challenges to Contemporary Political Parties” dalam Larry Diamond and Richard Gunther, eds., *Political Parties and Democracy*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 2001, hal. 339.

⁸ Ingrid van Biezen, “How Political Parties Shape Democracy”, *CSD Working Papers*, 11-01-2004, <https://escholarship.org/uc/item/17p1m0dx>, hal. 2.

Negara-negara Demokrasi Lama dan Baru

Kajian konseptual dan teoretis tentang partai-partai politik dan sistem-sistem kepartaian (*political parties and party systems*) sebagai bagian dari ilmu politik (*political science, politics*) dan ilmu politik perbandingan (*comparative politics*) yang berkembang pesat di Eropa Barat dan Amerika Utara dan kemudian disusul negara-negara di Eropa Utara telah menjadi rujukan baku, baik dari aspek teoretis maupun aspek praktis. Negara-negara di ketiga kawasan tersebut sering disebut sebagai “negara-negara demokrasi industrialis maju” (*advanced industrial democracies*) atau “negara-negara demokrasi mapan” (*established democracies*) atau “negara-negara demokrasi lama” (*old democracies*).

Runtuhnya Tembok Berlin pada akhir dasawarsa 1990-an memunculkan “gelombang demokratisasi” (*democratization wave*) di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah yang kemudian diikuti dengan negara-negara Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia. Negara-negara yang belakangan memilih bentuk pemerintahan atau sistem politik demokrasi kepartaian sering disebut dengan “negara-negara demokrasi baru” (*new democracies*).⁹

Svåsand mengingatkan bahwa tidak semua konsep dan teori mengenai perkembangan partai politik dan sistem kepartaian yang dipakai di negara-negara demokrasi lama dapat seutuhnya diterapkan untuk menelaah partai politik dan sistem kepartaian di negara-negara demokrasi baru. Sejarah perkembangan partai politik di negara-negara demokrasi baru – yang banyak menjadi negara jajahan – berbeda dengan sejarah perkembangan partai politik dan sistem kepartaian di negara-negara demokrasi lama, di mana ideologi-ideologi besar (kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme) digagas dan terus dikembangkan, menghadapi beberapa perang besar dan Perang Dunia, dan bahkan mengalami beberapa revolusi (Revolusi Perancis, Revolusi

⁹ Rujuk antara lain tulisan-tulisan dalam Paul Webb, David Farrell and Ian Holliday, eds., *Political Parties in Advanced Industrial Democracies*, Oxford: Oxford University Press, 2002; Paul Webb and Stephen White, eds., *Party Politics in New Democracies*, Oxford: Oxford University Press, 2007; dan Ingrid van Biezen, *Political Parties in New Democracies: Party Organization in Southern and East-Central Europe*, New York: Palgrave, 2003.

Industri, Revolusi Amerika, Revolusi Bolshevik).¹⁰

Bartolini dan Mair membenarkan bahwa adalah hal yang tidak selalu mudah untuk membandingkan partai politik dan sistem kepartaian di negara-negara demokrasi lama, khususnya di Eropa Barat, dengan partai politik dan sistem kepartaian di negara-negara demokrasi baru. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang paralel dan kesamaan di antara keduanya. Pertama, peran dan pentingnya partai politik berkembang secara evolusioner, mencapai demokrasi dalam proses yang lebih luas secara bertahap. Kedua, peran dan pentingnya partai politik akan merefleksikan keadaan lingkungan dalam mana para partai politik berkompetisi. Terakhir, peran dan pentingnya partai politik akan cenderung beragam, sesuai dengan pembentukan dan perkembangan partai politik di masing-masing negara.¹¹

Bentuk pemerintahan atau sistem politik demokrasi telah menjadi pilihan utama pada beberapa negara di dunia. Partai politik telah menjadi wahana yang hakiki dalam mencapai demokrasi. Partai politik telah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Wacana Anti-Partai Politik

Akan tetapi, kemudian, terjadi arus balik. Muncul gejala sikap anti-partai politik dalam masyarakat. Hal ini bukannya tidak beralasan. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik bermunculan akibat banyak kader partai politik yang menjadi pesakitan yang justru dapat merusak tatanan demokrasi yang telah diraih. Banyak kader partai politik serta politisi dan partisan lainnya yang terlibat tindak pidana, menghadapi proses persidangan, dan bahkan menjalani hukuman.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan para kader partai politik telah menjadi determinan utama atas munculnya ketidakpuasan dan kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-

¹⁰ Rujuk Lars Svåsand, "Party Development in the Old World: And in the New" dalam Wolfgang C. Müller dan Hanne Marthe Narud, eds., *Party Governance and Party Democracy*, New York: Springer, 2013, hal. 253-274.

¹¹ Bartolini and Mair, *op. Cit.*, hal. 327-332.

negara demokrasi lama, namun juga di negara-negara demokrasi baru, termasuk Indonesia di dalamnya.

Stokes menulis bahwa pada saat ini penduduk dunia lebih hidup dalam demokrasi daripada sebelumnya, sehingga lebih penting daripada sebelumnya untuk memahami bagaimana demokrasi bekerja dan menilai bagaimana demokrasi dapat berjalan. Banyak pengamat mengeluh tentang ketidakefektifan demokrasi dan tidak jarang mereka melemparkan kesalahan kepada lemahnya partai politik.¹²

Partai politik masa modern telah memunculkan masalah dan menunjukkan paradoks, kontradiksi, dan ambiguitas. Partai politik yang seyogyanya berfungsi sebagai wadah perwakilan rakyat, namun tidak dapat memberikan kepuasan dan tidak dapat dipercaya.¹³ Schmitter menambahkan bahwa partai-partai politik “tidak seperti yang dulu lagi” (*not what they once were*).¹⁴ Ignazi menekankan bahwa partai politik sudah terlepas dari masyarakat dan menjadi gangguan bagi negara.¹⁵ Webb bahkan menyebut bahwa partai politik – sebagai protagonis dalam demokrasi – sudah tidak terhubung (*disconnect*) lagi dengan demokrasi.¹⁶

Kemunculan sentimen anti-partai dikaitkan dengan kegagalan kepemimpinan perseorangan dan partai politik serta kelas politik sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial-ekonomi, geografis, budaya dan pendidikan. Selain itu, warga-negara pada saat ini lebih mudah mendapatkan informasi mengenai sepak terjang dan perilaku para kader partai politik

¹² S. C. Stokes, “Political Parties and Democracy”, *Annual Review of Political Science*, Vol. 2, 1999, hal. 263.

¹³ Rujuk Juan J. Linz, “Parties in Contemporary Democracies: Problems and Paradoxes” dalam Richard Gunther, Jose Ramon Montero and Juan J. Linz, eds. *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hal. 291-317.

¹⁴ Rujuk Philippe C. Schmitter, “Parties are Not What They Once were” dalam Diamond and Gunther, eds., *op. cit.*, hal. 67-89.

¹⁵ Rujuk Piero Ignazi, “Power and the (il)legitimacy of Political Parties: An Unavoidable Paradox of Contemporary Democracy?”, *Party Politics*, *Online first*, 1354068813519970, first published on January 23, 2014 as doi:10.1177/1354068813519970.

¹⁶ Rujuk Paul Webb, “Political Parties and Democratic Disconnect: A Call for Research” dalam Paul Webb, *Democracy and Political Parties*, London: Hansard Society, 2007, hal. 5-25.

sehari-hari berkat kemajuan teknologi informasi.¹⁷

Meski para akademisi dan warga mengakui bahwa partai politik adalah pilar demokrasi, masyarakat sekarang ini melihat partai politik sebagai tidak responsif, tidak dapat dipercaya, dan tidak mewakili rakyat. Hal ini akan berakibat terhadap berkurangnya keterlibatan pemilih, pilihan pemilih yang cenderung anti-partai, dan generalisasi ketidakpercayaan kepada semua kader partai politik.¹⁸ Partai politik semakin ditinggalkan anggotanya dan partisannya.¹⁹ Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Mair, bahwa akan terjadi suatu bentuk demokrasi tanpa keterlibatan pemilih (*democracy without demos*) di mana partai politik terus menerus melemah dan demokrasi menjadi semakin terlucuti.²⁰ Pada masa mendatang partai politik akan menghadapi kenyataan bahwa pemilih dan masyarakat pada umumnya akan semakin terkucil dan lebih individualis, identitas dan ideologi partai politik semakin samar, dan peran perwakilan akan semakin berkurang.²¹

Dikotomi antara gagasan ideal partai politik dengan kenyataan politik praktis partai politik dalam demokrasi memang telah menjadi wacana tersendiri dalam kajian partai politik dewasa ini. Sentralitas partai politik sebagai lembaga kunci demokrasi modern terus berkembang dan partai politik telah begitu mengakar dalam masyarakat. Namun, kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya menjadi kritik berkelanjutan terhadap partai politik.²² Tumbuhnya skeptisisme terhadap peran partai politik memang telah mendorong pengkaji partai politik untuk mengalihkan perhatian dari kajian tentang

¹⁷ Rujuk Ingrid van Biezen, "Focus: The State of Parties, Party Democracy in the 21st Century. Introduction", *European Review*, Vol. 16, No. 3, 2008, hal. 263-269.

¹⁸ Rujuk Russell J. Dalton and Steven A. Weldon, "Public Images of Political Parties: A Necessary Evil?", *West European Politics*, Vol. 28, No. 5, Nov. 2005, hal. 931-951.

¹⁹ Russell J. Dalton and Martin P. Wattenberg, "Unthinkable Democracy: Political Change in Advanced Industrial Democracies" dalam Russell J. Dalton and Martin P. Wattenberg, eds., *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Countries*, Oxford: Oxford University Press, 2000, hal. 5.

²⁰ Peter Mair, "Democracy beyond Parties" *CSD Working Papers*, 04-01-2005 / <http://escholarship.org/uc/item/3vs886v9>, hal. 1-27.

²¹ Rujuk Peter Mair, "Political Parties and Democracy: What Sort of Future?", *Central European Political Science Review*, Vol. 4, No. 13, 2003, hal. 6-20.

²² Rujuk Ingrid van Biezen, "Review Article: The Place of Parties in Contemporary Democracy", *West European Politics*, Vol. 26, No. 3, Jul. 2003, hal. 171-184.

fungsi partai politik ke kajian tentang perubahan peran partai politik dan akibat penyesuaian diri partai politik.²³

Perkembangan Model Partai Politik

Untuk menelaah kemerosotan partai politik dan implikasinya lewat kemunculan sikap anti-partai, dapat dipergunakan beberapa teori partai politik dan sistem kepartaian. Terdapat banyak konsep dan teori dalam kajian partai politik dan sistem kepartaian. Dalam tulisan ini hanya menggunakan beberapa di antaranya, diawali dengan teori perkembangan atau model partai politik.

Sejarah perkembangan atau model partai politik dari asal mula munculnya pada abad ke-19 sampai keberadaan partai politik pada masa mutakhir juga telah menjadi perhatian para teoretisi dan pemerhati partai politik dan sistem kepartaian. Tulisan Katz dan Mair mengenai kemunculan partai kartel (*cartel party*) yang ditulis pada tahun 1995 telah menjadi tulisan yang paling sering dipakai sebagai rujukan dan kutipan dalam khazanah kajian partai politik dan sistem kepartaian. Katz dan Mair menguraikan perkembangan partai politik dalam empat tahap. Tahap-tahap tersebut adalah: partai kader atau partai elite (*cadre/elite party*); partai massa (*mass party*); partai rangkul-semua (*catch-all party*); dan partai kartel.²⁴

Keempat tahap perkembangan model partai tersebut dianalisis dari aspek pergeseran keterlibatan partai politik dari masyarakat madani (*civil soceity*) ke negara (*state*). Menurut mereka, partai politik mula-mula muncul dari dan berada dalam masyarakat madani dengan wadah model partai politik kader/elite. Seiring perkembangan zaman, partai politik kemudian berubah menjadi partai massa dan bertindak sebagai penghubung (*link*) antara masyarakat madani dengan negara. Selanjutnya partai politik berkembang menjadi partai rangkul-semua, dimana partai politik bertindak sebagai makelar (*broker*) antara negara dengan

²³ Rujuk Luciano Bardi, Stefano Bartolini and Alexander Trechsel, "Party Adaptation and Change and the Crisis of Democracy", *Party Politics*, Online first 1354068813519966, first published on February 3, 2014 as doi:10.1177/1354068813519966.

²⁴ Rujuk Richard S. Katz and Peter Mair, "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party", *Party Politics*, Vol. 1., No. 1, 1995, hal.5-28.

masyarakat madani; dalam tahap ini partai politik berkurang perannya sebagai agen dari masyarakat madani. Terakhir, partai politik berubah menjadi partai kartel; dalam tahap ini partai politik telah menjadi bagian dari negara dan banyak menggunakan sumber-sumber daya negara.

Krouwel kemudian membuat kajian serupa mengenai perkembangan model partai politik. Namun, Krouwel menambahkan tahapan kelima, sehingga perkembangan tersebut meliputi partai elite dan kader (*elite and cadre parties*), partai massa (*mass parties*), partai rangkul-semua elektoral (*electoral catch-all parties*), partai kartel dan negara partisan (*cartel parties and partisan state*), dan terakhir partai firma bisnis (*business firm parties*). Dalam tahap kelima, menurut Krouwel, partai politik tidak hanya menggunakan sumber-sumber daya dari dalam negara, tetapi juga melibatkan sektor-sektor swasta. Terdapat dua jenis partai politik firma bisnis: pertama berdasar pada firma yang telah ada dijadikan proyek politik dan kedua berdasar pada pembentukan proyek politik dengan landasan prinsip-prinsip bisnis.²⁵

Dari dua teori perkembangan model partai politik di atas, khususnya mulai dari tahap partai politik rangkul-semua sampai tahap partai politik firma bisnis – di mana partai politik perlahan-lahan semakin terintegrasi dengan negara dan semakin meninggalkan masyarakat madani, sedikit banyak kita dapat melihat bahwa partai politik rawan terhadap tindak pidana korupsi. Meski kajian ketiga penulis di atas dilakukan pada perkembangan partai politik di negara-negara demokrasi lama; namun demikian, sedikit banyak dapat diterapkan untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi di kawasan dan negara lain, tidak terkecuali Indonesia.

Dari pemaparan teoretis di atas, kita dapat berkaca bagaimana perkembangan partai politik di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda pada awal abad ke-19 sampai sekarang ini. Perkembangan partai politik di Indonesia pada hakikatnya juga mengikuti “tahapan” perkembangan model partai politik di atas. Kita juga dapat bercermin bahwa kita telah memasuki

²⁵ Rujuk Andre Krouwel, “Party Models” dalam *Party Transformations in European Democracies*, New York: SUNY Press, 2012, hal. 15-27.

tahapan kelima dari perkembangan model partai politik, yakni partai firma bisnis; sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh keberadaan dan sepek terjang partai-partai politik di Indonesia dewasa ini.

Perilaku Partai Politik Kompetitif

Dalam pada itu, dari sudut pandang teoretis lain, Strøm mengembangkan teori mengenai perilaku partai-partai kompetitif (*behavioral theory of competitive parties*). Menurut Strøm terdapat tiga model perilaku partai, yakni: partai pencari-suara (*vote-seeking party*), partai pencari-kedudukan (*office-seeking party*), dan partai pencari-kebijakan (*policy-seeking party*). Secara keseluruhan Strøm membangun suatu model utuh perilaku partai politik (*a unified model of party behavior*) melalui bangunan segitiga pertukaran antar-tujuan yang berbeda.²⁶

Kajian teoretis lebih lanjut tentang teori segitiga perilaku partai politik Strøm dibahas oleh Wolinetz. Memandang bahwa model segitiga perilaku partai politik menemui masalah dalam hal operasionalisasi, Wolinetz menggunakan dimensi yang lebih umum dari model segitiga Strøm dan menjabarkan bahwa *vote-seeking party* berkaitan dengan partai rangkul-semua (*catch-all party*) atau partai profesional elektoral (*electoral professional parties*), partai kartel berkaitan dengan *office-seeking party*, dan partai integrasi massa (*party of mass integration*) berkaitan dengan *policy-seeking party*.²⁷ Wolinetz berpendapat bahwa, pertama-tama, partai politik akan memiliki orientasi mencari suara (*vote-seeking*) ketika akan memasuki masa pemilihan umum lembaga legislatif, maka partai politik akan berfungsi sebagai partai politik rangkul-semua (*catch-all party*). Ketika pemilihan umum legislatif telah selesai, partai politik akan berorientasi pada kedudukan (*office-seeking*), maka partai politik akan melakukan koalisi dan akan berfungsi sebagai partai kartel (*cartel party*). Setelah masuk dalam koalisi dan mendapatkan kedudukan maka partai politik akan berorientasi

²⁶ Rujuk Kaare Strøm, "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties", *American Journal of Political Science*, Vol. 34, No. 2, May 1990, hal. 565-598.

²⁷ Rujuk Steven B. Wolinetz, "Beyond the Cath-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies" dalam Gunther, Ramon-Montero and Linz, eds., hal. 149-165.

kepada kebijakan (*policy-seeking*) dengan mencari dukungan massa melalui partai integrasi massa.

Dengan demikian, terdapat daur ulang orientasi dan perilaku partai politik dari *vote-seeking* ke *office-seeking* sampai *policy-seeking* yang dilihat dari rangkaian waktu menjelang pemilihan umum legislatif, pembentukan kabinet, dan dalam menjalankan pemerintahan serta kemudian berdaur ulang dengan pola yang sama. Dalam situasi tersebut sangat terbuka bagi negosiasi politik, kompromi politik, konsesi politik, dan politik *trade off* antar-partai politik dan antar-faksi di internal partai politik. Dari sisi inilah terbuka pintu-pintu masuk bagi tindak pidana korupsi. Teori “*triad*” ini juga berguna dalam menganalisis perilaku partai-partai politik di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, khususnya bila kita melihat maraknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kader partai politik serta politisi dan partisan lain.

Pelebagaan Partai Politik dan Pelebagaan Sistem Kepartaian

Pada hakikatnya, kemerosotan dan menurunnya pamor partai politik dalam masyarakat diakibatkan oleh lemahnya pelebagaan partai politik dan pelebagaan sistem kepartaian (*political party institutionalization*) dan pelebagaan sistem kepartaian (*party system institutionalization*). Ezrow mengingatkan bahwa pelebagaan partai politik dan sistem kepartaian adalah penting dalam negara-negara demokrasi baru. Mengingat negara-negara demokrasi baru bersifat rapuh dan dapat mungkin kembali ke otoriterisme, maka partai politik lah yang membuat demokratisasi dapat terus berlangsung. Pentingnya pelebagaan partai politik bagi negara-negara demokrasi baru adalah (1) Membuat pemerintah akuntabel dalam menjalankan aksi-aksinya, (2) Mencegah munculnya para politisi anti-partai, (3) Membiasakan publik dengan praktik dan norma demokratis, (4) Mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan, (5) Merekrut, menominasi, dan menyosialisasi kepemimpinan politik, dan (6) Membentuk dan mempertahankan pemerintahan.²⁸ Pelebagaan

²⁸ Natasha M. Ezrow, “The Importance of Parties and Party System Institutionalization in New Democracies”, *IDCR Briefing Paper*, 06/11, 2011, hal. 2.

partai politik, utamanya membenahan perangkat-perangkat internal partai politik untuk menjadi lebih baik,²⁹ semakin penting mengingat partai politik memainkan peran dalam proses politik sebagai perantara antara keinginan-keinginan warga negara yang sedang berubah dengan struktur-struktur negara, dan hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan berdemokrasi sehari-hari.³⁰

Gelombang demokratisasi di dunia pasca Perang Dingin (*Cold War*) pada akhir dasawarsa 1980-an, khususnya di Amerika Latin, membuat Mainwaring dan Scully menelurkan gagasan (*notion*) pelembagaan sistem kepartaian (*party system institutionalization*). Gagasan ini melihat bahwa untuk menciptakan demokrasi yang berkesinambungan harus tercipta suatu sistem kepartaian yang terlembaga (*institutionalized party system*). Sistem kepartaian yang terlembaga adalah kestabilan sistem kepartaian dalam kompetisi antar-partai politik. Tingkat kestabilan ditentukan oleh empat karakteristik, yakni stabilitas dalam pola persaingan antar-partai politik (*stability in patterns of interparty competition*), akar partai politik dalam masyarakat (*party roots in society*), legitimasi partai dan pemilihan umum (*the legitimacy of parties and elections*), dan organisasi partai politik (*party organization*).³¹

Randall dan Svåsand kemudian juga mengembangkan teori pelembagaan sistem kepartaian yang agak berbeda dengan

²⁹ Gideon Rahat, Reuven Y. Hazan and Richard S. Katz, "Democracy and Political Parties", *Party Politics*, Vol. 14, No. 6, 2008, hal. 663-683.

³⁰ Rujuk Miki Caul Kittilson and Susan E. Scarrow, "Political Parties and the Rhetoric and Realities of Democratization" dalam Bruce E. Cain, Russell J. Dalton and Susan E. Scarrow, eds., *Democracy Transformed? Expanding Opportunities in Advanced Industrial Democracies*, Oxford: Oxford University Press, 2003, hal. 59-80.

³¹ Rujuk Scott Mainwaring and Timothy R. Scully, "Introduction: Party Systems in Latin America" dalam Scott Mainwaring and Timothy R. Scully, eds., *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford: Stanford University Press, 1995, hal. 1-34; Scott Mainwaring, "Rethinking Party Systems Theory in the Third Wave Democratization: The Importance of Party System Institutionalization", *Kellogg Institute Working Paper*, No. 260, October 1998, hal. 1-31; Scott Mainwaring, "Reexamining Party Systems Theory in the Third Wave of Democratization" dalam *Rethinking Party Systems in Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*, Stanford: Stanford University Press, 1999, hal. 19-60; Scott Mainwaring and Mariano Torcal, "Party System Institutionalization and Party System Theory after the Third Wave of Democratization", *Kellogg Institute Working Paper*, No. 319, April 2005, hal. 29; dan Scott Mainwaring and Edurne Zoco, "Political Sequences and the Stabilization of Interparty Competition", *Party Politics*, Vol. 13, No. 2, 2007, hal. 155-178.

Mainwaring dan kawan-kawan. Randall dan Svåsand yang memfokuskan pada negara-negara Dunia Ketiga (*Third World*) menganggap bahwa “bapak” pelebagaan adalah Samuel Huntington. Huntington yang membahas tentang pelebagaan politik menulis “pelebagaan adalah proses dimana organisasi dan prosedur menghasilkan nilai dan stabilitas” (*institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability*). Lebih lanjut, Randall and Svåsand menggunakan teori Panebianco tentang partai-partai politik. Panebianco menganggap pelebagaan sebagai suatu cara organisasi menguatkan diri (*solidifies*). Dengan menggunakan beberapa teori dari pakar ilmu politik lainnya serta terlebih dahulu membahas pelebagaan partai politik, Randall dan Svasand kemudian mengemukakan empat dimensi pelebagaan sistem kepartaian, yakni: kesinambungan dan stabilitas (*continuity and stability*), hubungan partai politik-negara (*party-state relationship*), saling terima (*mutual acceptance*), dan penghargaan oleh pemilih (*appreciation by electorate*).³²

Teoretisi partai politik Wolinetz juga mengemukakan teorinya tentang pelebagaan sistem kepartaian. Dengan menggunakan gagasan Gordon Smith tentang inti sistem kepartaian (*party system core*), Wolinetz menyatakan bahwa suatu sistem kepartaian sudah terlebaga ketika para pelaku utama (: partai politik) dapat menciptakan suatu sistem kepartaian yang relatif konstan dan berinteraksi dalam cara-cara yang dapat diperkirakan, berulang dari waktu ke waktu.³³ Kestabilan dan keberlanjutan pada hakikatnya adalah inti dari pelebagaan sistem kepartaian.

Harry Ekstein menulis bahwa kajian tentang partai politik memiliki dua segi. Yang pertama adalah kajian tentang

³² Vicky Randall and Lars Svasand, “Party Institutionalisation and the New Democracies” dalam Jeff Haines, ed., *Democracy and Political Change in the ‘Third World’*, London: Routledge, 2001, hal. 77-00; Vicky Randall and Lars Svasand, “Party Institutionalization in New Democracies”, *Party Politics*, Vol. 8, No. 1, 2002, hal. 5-29, dan Vicky Randall, “Party Institutionalization and Its Implications for Democracy”, Paper for Session MT.239 Political Parties and Democratization, at the IPSA Congress, at Fukuoka, July 9-13, 2006, hal. 1-40.

³³ Rujuk Steven B. Wolinetz, “Party System Institutionalization: Bringing the System Back In” Prepared for the Annual Meeting of the Canadian Political Science Association, Sakatoon, May 29 – June 1, 2006, hal. 1-20.

Towards Bolder Regional Economic Arrangements: A Light Calculation on Strategic Benefits Stem from Indonesia's Multiple Adherence

Dodik Ariyanto ¹

The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Ministers met on the 4th and 5th October 2013 in Bali, Indonesia with the main purpose of reiterating member countries' shared commitments towards regional economy while to continue their course to integrate adherent countries into 'one but multiple' economy. Also present at the meeting were Director General of the World Trade Organization (WTO), Chair of the APEC Business Advisory Council (ABAC), Secretary General of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Co-Chairs of the Pacific Economic Cooperation Council (PECC), Representatives of the Pacific Islands Forum (PIF), and Representatives of the Melanesian Spearhead Group (MSG). The main agenda of the meeting were: i) reviewing the current state of affairs in the Asia-Pacific Region; ii) assessing the progress made along the year; iii) discussing the way forward for APEC to ensure the Asia-Pacific region remains resilient, and iv) fulfilling the Asia-Pacific's role as the engine of global growth. At the surface, the snowball effect is real since these economies

¹ Dodik Ariyanto, S.I.P, D.E.A, Ph.D. adalah staf pada Kedeputusan Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.